

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan			
		Teori Yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis Data
Nadhiyah Nur Fitri	Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)	Teori Pembangunan menurut A. Lewis Teori Dampak Sosial Ekonomi menurut Soeratmo	Kuantitatif	Deskriptif	Uji Beda Rata-Rata (Uji t)
Fathani Muttakin	Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa (Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo)	Teori Infrastruktur menurut Grigg Teori Pendapatan menurut Sukirno	Kuantitatif	Deksriptif	Uji Regresi Linear Sederhana
Annisa Inayatul Aini	Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Bandar Lampung	Teori Pembangunan Ekonomi menurut Todaro dan Smith	Kuantitatif	Deskriptif	Uji Regresi Linier Berganda

	Tahun 2009-2015 Dalam Prespektif Ekonomi Islam	Teori Infrastruktur menurut Larimer (1994)			
--	--	---	--	--	--

Sumber: Nadhiyah Nur Fitri (2018), Fathani Muttakin (2018), dan Annisa Inayatul Aini (2018)

1. Penelitian terdahulu Nadhiyah Nur Fitri

Penelitian Nadhiyah Nur Fitri berjudul “Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)”. Hasil dari penelitian yang dilakukan pada 76 orang responden menyatakan bahwa sebelum adanya pembangunan jalan tol mereka tidak mengalami dampak apapun, setelah dengan adanya proyek pembangunan jalan tol, 76 repsonden menyatakan terdapat perubahan dari segi sosial maupun ekonomi, dampak sosial antara lain antara lain 68,4% menyatakan berisik, 60,5% menyatakan hubungan sosial yang renggang, 60,5% menyatakan lingkungan semakin rusak, 55,3% menyatakan lalu lintas menjadu semakin padat. Sedangkan dari segi ekonomi dari sektor pertanian masyarakat menjadi berkurang pula. Pemukiman yang terkan proses pembebasan lahan juga turut berdampak. Pengeluaran masyarakat semakin berkurang serta pendapatan bertambah dikarenakan uang ganti rugi pembebasan lahan masyarakat digunakan untuk usaha lain. Sedangkan dari sisi pekerjaan, sebelum adanya proyek proses pembangunan jalan tol masyrakat masih berprofesi sebagai

pertani, kemudian setelah adanya proyek pembanguana jalan tol yang menyita banyak lahan termasuk lahan pertanian kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai pekerja proyek.

Persamaan penelitian Nadhiyah Nur Fitri dengan penelitian ini terletak pada Variabel Terikat (Y) mengenai Kondisi Sosial Ekonomi. Penelitian Nadhiyah Nur Fitri sama-sama membahas tentang Infrastuktur.

Perbedaan penelitian Nadhiyah Nur Fitri dengan penelitian ini terletak pada Variabel Bebas (X) yang mana dalam penelitian atas Variabel X nya mengenai “Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol” sedangkan penelitian ini mengenai “Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12”. Penelitian Nadhiyah Nur Fitri berlokus di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan sedangkan penelitian ini berlokus di Taman Laman Boenda Kota Tanjungpinang. Penelitian Nadhiyah Nur Fitri menggunakan alat ukurnya dari Teori Pembangunan menurut A. Lewis dan Teori Dampak Sosial Ekonomi menurut Soeratmo sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Infrastruktur menurut Grigg dan Teori Kondisi Sosial Ekonomi menurut Abdulsyani.

2. Penelitian terdahulu Fathani Muttakin

Penelitian Fathani Muttakin yang berjudul “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pendapatan

Masyarakat Desa (Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo)”. Hasil penelitian memberikan jawaban hipotesis, bahwa variabel pembangunan infrastruktur jalan mempengaruhi pendapatan masyarakat desa sebesar 0,445 atau 44,5% dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 hal ini berarti lebih kecil dari 0,05. Dan dinyatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat Desa Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

Persamaan penelitian Fathani Muttakin dengan penelitian ini terdapat pada alat ukur dalam Teori Infrastruktur menurut Grigg pada variable bebas (X). Teknik Analisis Data yang digunakan sama-sama menggunakan Teknik Uji Regresi Linear Sederhana. Penelitian Fathani Muttakin sama-sama membahas tentang Pengaruh Pembangunan Infrastuktur.

Perbedaan penelitian Fathani Muttakin dengan penelitian ini terletak pada Variabel Terikat (Y) yang mana dalam penelitian Fathani Muttakin “Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa” sedangkan penelitian ini “Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat”. Lokus Penelitian Fathani Muttakin berada di Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, sedangkan penelitian ini berada di Taman Laman Boenda Kota Tanjungpinang.

3. Penelitian terdahulu Annisa Inayatul Aini

Penelitian Annisa Inayatul Aini yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2015 Dalam Prespektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian yang pertama panjang jalan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Bandar Lampung. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikansi parametrik individu (Uji t) dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,877 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,18185. Sedangkan transportasi (banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang) tidak berpengaruh signifikan juga terhadap pembangunan ekonomi di Kota Bandar Lampung. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai t_{hitung} sebesar -1,158 lebih kecil dari t_{tabel} 2,13185. Lalu yang kedua. Dalam pandangan pembangunan ekonomi islam memandang bahwa pembangunan ekonomi merupakan peningkatan kesadaran insan atas tanggungjawabnya terhadap berbagai hakikat dan masalah yang mengikuti urutan keutamaan yang sah, dan amal perbuatan yang ikhlas, berhikmah, berani, sederhana dan adil. Hasil penelitian yang dilakukan, pembangunan di Kota bandar Lampung tidak berpengaruh secara signifikan oleh infrastruktur (panjang jalan dan banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang).

Persamaan penelitian Annisa Inayatul Aini dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Pengaruh Pembangunan Infrastruktur.

Perbedaan penelitian Annisa Inayatul Aini dengan penelitian ini terletak pada Variabel Terikat (Y) yang mana dalam penelitian Annisa Inayatul Aini “Terhadap Pembangunan Ekonomi” sedangkan penelitian ini “Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi”. Alat ukur yang digunakan pada penelitian Annisa Inayatul Aini menggunakan teori Teori Pembangunan Ekonomi menurut Todaro dan Smith Teori Infrastruktur menurut Larimer (1994) sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Infrastruktur menurut Grigg dan Teori Kondisi Sosial Ekonomi menurut Abdulsyani. Lokus pada penelitian Annisa Inayatul Aini berada di Kota Bandar Lampung sedangkan pada penelitian ini berada di Taman Laman Boenda Kota Tanjungpinang.

2.1.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan

pilihan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun tidak dalam melakukan suatu tindakan tertentu.

Menurut Abdul Wahab 2008 (dalam bukunya **Abdal, 2015:22** yang berjudul **Kebijakan Publik**) memberikan beberapa pedomannya sebagai berikut: (a) kebijakan harus dibedakan dari keputusan. (b) kebijakan sebenarnya tidak serta dapat dibedakan dari administrasi. (c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. (d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. (e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai. (f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun Implisit. (g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. (h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi (i)Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah. (j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Laswell dan Kaplan (dalam buku **Dr. Taufiqurokhman, 2014:3** yang berjudul **Kebijakan Publik**) juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Robert Eyestone (dalam buku **Dr. Taufiqurokhman, 2014:4** yang berjudul **Kebijakan Publik**) mendefinisikan kebijakan publik sebagai Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.

Sedangkan Menurut **Nugroho** (dalam buku **Dr. Taufiqurokhman, 2014:4** yang berjudul **Kebijakan Publik**) terdapat dua karakteristik dari kebijakan publik, yakni:

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
- b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

James E. Aderson (dalam buku **Dr. Taufiqurokhman, 2014:4** yang berjudul **Kebijakan Publik**) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or ,atter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Sedangkan disini, menurut **Sholichin Abdul Wahab** (dalam buku **Dr. Taufiqurokhman, 2014:5** yang berjudul **Kebijakan Publik**) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih

baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu:

a. Tuntutan Kebijakan (*Policy Demands*)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

b. Keputusan Kebijakan (*Policy Decisions*)

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c. Pernyataan Kebijakan (*Policy Statements*)

Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d. Keluaran Kebijakan (*Policy Outputs*)

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e. Hasil Akhir Kebijakan (*Policy Outcomes*)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Setelah memaparkan makna dari kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan oleh **Bill Jenkins** (dalam

buku **Dr. Taufiqurokhman, 2014:9** yang berjudul **Kebijakan Publik**) Kebijakan Publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapatkan hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.

Dengan demikian, kebijakan publik sangat berkaitan erat dengan administrasi publik ketika aktor publik mengkoordinasikan seluruh kegiatannya yang berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan negaranya melalui berbagai kebijakan publik yang dibuat.

2.1.3 Pembangunan Infrastruktur

2.1.3.1 Pembangunan

Menurut Atmosoedirdjo (dalam bukunya **Dadang Solihin, 2020:3** dalam bukunya yang berjudul **Administrasi Pembangunan**) Administrasi Pembangunan merupakan sarana Instrumental untuk menetapkan, memantapkan, dan melaksanakan tujuan nasional dalam pembangunan negara.

Istilah pembangunan biasanya memiliki arti yang berbeda dengan satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, maupun negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum terdapat suatu kesepakatan menurut **Riyadi dan Deddy Supriyadi**

(dalam buku **Kumba Digdowiseiso, 2019:6** dengan judul **Teori Pembangunan**) bahwa Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Menurut **Ginanjart Kartasasmita** (dalam buku **Kumba Digdowiseiso** dengan judul **Teori Pembangunan**) Pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya.

Menurut **Sahya Anggara dan Ii Sumantri (2016:19)** dalam bukunya yang berjudul **Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik:**

“Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.”

Alexander (dalam buku **Sahya Anggara dan Ii Sumantri, 2016:18** dengan judul **Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik**) Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Berdasarkan pengertian pembangunan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Pembangunan merupakan suatu proses perubahan atau transformasi kondisi sosial ekonomi maupun budaya yang sudah dilakukan secara terencana demi terciptanya kesejahteraan bagi rakyat di negara tersebut. Pembangunan menjadi konsep dalam melaksanakan suatu perubahan yang berlangsung lama atau berkelanjutan yang tujuan tidak lain untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

2.1.3.2 Infrastruktur

Infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Secara teknik, pengertian infrastruktur dijelaskan sebagai aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal. Oleh karena itu, infrastruktur merupakan bagian-bagian berupa sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan satu sama lain yang didefinisikan ke dalam suatu sistem.

Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (4) Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur:**

“Infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.”

Menurut **Gregory Mankiw** infrastruktur artinya wujud modal publik (public capital) yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya, sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah (**dalam Muhammad Idris**).

Infrastruktur memiliki peran penting dalam melaksanakan pengembangan wilayah. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif dalam pembangunan nasional dan daerah.

Grigg (dalam Skripsi **Faiz Azmi, 2018:23** yang berjudul **Analisis Dampak Pembangunan Teras Cihampelas Terhadap Bisnis Sektor Formal Dan Pedestrian**) Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Infrasruktur memiliki pengaruh yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterahkan

rakyatnya, antara lain dalam meningkatkan nilai konsumsi, produktivitas tenaga kerja, akses kepada lapangan kerja, serta meningkatkan kondisi perekonomian. Itu sebabnya penting bagi suatu daerah atau negara untuk terus meningkatkan infrastrukturnya.

2.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi

2.1.4.1 Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat diartikan sebagai keadaan masyarakat disuatu negara pada saat tertentu. Menurut **Dalyono** (dalam Skripsinya **Infantri Mahaputra, 2018:28** yang berjudul **Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan)**), Kondisi Sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Kondisi social dapat mempengaruhi seorang individu melalui dengan dua cara, yakni secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dalam pergaulan sehari-hari baik dari keluarga, teman, ataupun pekerjaannya. Sedangkan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media massa baik cetak, audio, maupun audio visual. Keadaan lingkungan social juga sangat

berpengaruh terhadap kondisi social seorang individu seperti teman bergaul, lingkungan tetangga, dan aktivitas yang terjadi di dalam masyarakat.

Linton (dalam Skrpsinya **Infantri Mahaputra, 2018:28** yang berjudul **Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan)**) juga mengatakan bahwa kondisi sosial masyarakat mempunyai lima indikator, yaitu: umur dan jenis kelamin, pekerjaan, prestise, family atau kelompok rumah tangga, dan keanggotaan dalam kelompok perserikatan.

Sedangkan menurut **Soekanto** (dalam Skrpsinya **Infantri Mahaputra, 2018:28** yang berjudul **Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan)**) kondisi sosial adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya.

2.1.4.2 Kondisi Ekonomi

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yakni *Oikonomia* yang mana kata *Oikonomia* ini berasal dari dua kata yaitu *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* sendiri memiliki arti rumah tangga, sedangkan *Nomos* memiliki arti mengatur. Itu berarti *Oikonomia* adalah mengatur rumah tangga.

Menurut **Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (2001: 21)**:

“Keadaan ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status.

Status ekonomi dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga kebutuhan barang pokok. Marx melihat bahwa *economic structure* adalah sebagai awal dari semua kegiatan manusia. *Economic structure* adalah penggerak dalam perubahan yang akan memimpin perubahan termasuk dalam perubahan sosial.

Susanto (dalam Skripsinya **Infantri Mahaputra, 2018:33** yang berjudul **Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung**

Kabupaten Lampung Selatan)) menyebutkan penilaian subjektif seseorang mengenai status ekonomi masyarakat dapat dilihat dari:

- a. Bentuk rumah, ukuran, kondisi, perawatan rumah dan tata kebun.
- b. Wilayah tempat tinggal atau lingkungan juga dapat menentukan status.
- c. Pekerjaan atau profesi yang dipilih seorang menunjukkan keinginan dengan lapisan masyarakat tertentu.
- d. Sumber pendapatannya.

2.1.4.3 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Menurut **Sumardi dan Evers** (dalam Skripsinya **Infantri Mahaputra, 2018:33** yang berjudul **Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan)**) keadaan Sosial Ekonomi yaitu sebagai berikut:

- a. Lebih berpendidikan.
- b. Mempunyai status sosial yang ditandai dengan tingkat kehidupan, kesehatan, pekerjaan, pengenalan diri terhadap lingkungan.

- c. Mempunyai tingkat mobilitas ke atas lebih besar.
- d. Mempunyai ladang luas.
- e. Lebih berorientasi pada ekonomi komersial produk.
- f. Mempunyai sikap yang lebih berkenaan dengan kredit.
- g. Pekerjaan lebih spesifik.

Menurut **Abdulsyani 1994** (dalam Jurnalnya **Jean M.A, V. V. Rantung, dan F. Kerebungu, 2016:4** yang berjudul **Perubahan Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Setelah Reklamasi di Kelurahan Wenang Selatan**) Kondisi Sosial Ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang dimiliki.

Sedangkan menurut **Jean M, V.V. Rantung, F. Kerebungu (2016:4)** dalam Jurnal yang Berjudul **Perubahan Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Setelah Reklamasi di Kelurahan Wenang Selatan:**

“Membahas faktor sosial ekonomi, selalu berkaitan dengan beberapa yang berturut-turut dan konsepsi dasarnya sebagai berikut: (1) Pendidikan, (2) Status Sosial, (3) Pendapatan, (4) Alokasi Pendapatan.”

Irfantri Mahaputra (2018:37) dalam Skripsinya yang berjudul **Analisis Dampak Pembangunan Jalan tol Trans Sumatra Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di**

Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan) mengatakan terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya sosial ekonomi orang tua dimasyarakat:

“(1) tingkat pendidikan, (2) jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kondisi lingkungan tempat tinggal, (3) pemilikan kekayaan, (4) partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya.”

2.1.5 Hubungan Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat penting jika ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Wilayah pesisir memainkan peran yang cukup penting, baik dalam kesejahteraan sosialnya maupun ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Menurut **Setia Mulyawan (2015:2)** dalam Penelitiannya yang berjudul **Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Jalan:**

“Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses perbaikan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berlangsung terus menerus menuju keadaan yang lebih baik. Tujuan pembangunan ini adalah kesejahteraan masyarakat.”

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pantai Pesisir ini akan memiliki pengaruh yang cukup kuat ketika mengembangkan daerah pembangunan infrastruktur tersebut menjadi suatu objek

wisata yakni Taman Laman Boenda yang mana hal tersebut akan berpengaruh pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat disana baik dari segi pengaruh negatif maupun positifnya.

2.2 Kerangka Berpikir

Dalam Kerangka ini, peneliti akan menjelaskan objek penelitian dan objek permasalahan mengenai Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Laman Boenda Kota Tanjungpinang yang pada dasarnya Pembangunan Infrastruktur ini dilaksanakan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Kota Tanjungpinang dengan menambah destinasi wisata yang ada.

Wilayah pesisir merupakan wilayah pintu gerbang dari berbagai aktivitas pembangunan manusia dan sekaligus menjadi pintu gerbang dari berbagai macam dampak yang terjadi akibat aktivitas tersebut. Dengan kata lain, wilayah pesisir merupakan wilayah yang pertama kalinya dan paling banyak menerima terkanan dibandingkan wilayah lainnya. Tekanan tersebut muncul dari aktivitas pembangunan seperti pembangunan permukiman, aktivitas perdagangan di wilayah pesisir, pembangunan tempat-tempat wisata serta pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya yang pada akhirnya akan mengalami perubahan baik secara alami maupun fisik, sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan. Pembangunan Infrastruktur tersebut

kemudian diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal sosial ekonominya.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan teori-teori para ahli untuk dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam usulan penelitian ini.

Menurut **Grigg 1988** (dalam Skripsi **Faiz Azmi, 2018:23** yang berjudul **Analisis Dampak Pembangunan Teras Cihampelas Terhadap Bisnis Sektor Formal Dan Pedestrian**), Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Disini peneliti menyimpulkan dimensi-dimensi atau indikator-indikator yang terdapat di dalam teori infrastruktur menurut Grigg yakni:

1. Transportasi
2. Pengairan
3. Drainase
4. bangunan gedung
5. fasilitas lainnya.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan mengenai indikator Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian dengan mengikuti teori menurut Menurut **Abdulsyani 1994** (dalam Jurnalnya **Jean M.A, V. V. Rantung, dan F. Kerebungu, 2016:4** yang berjudul **Perubahan Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Setelah**

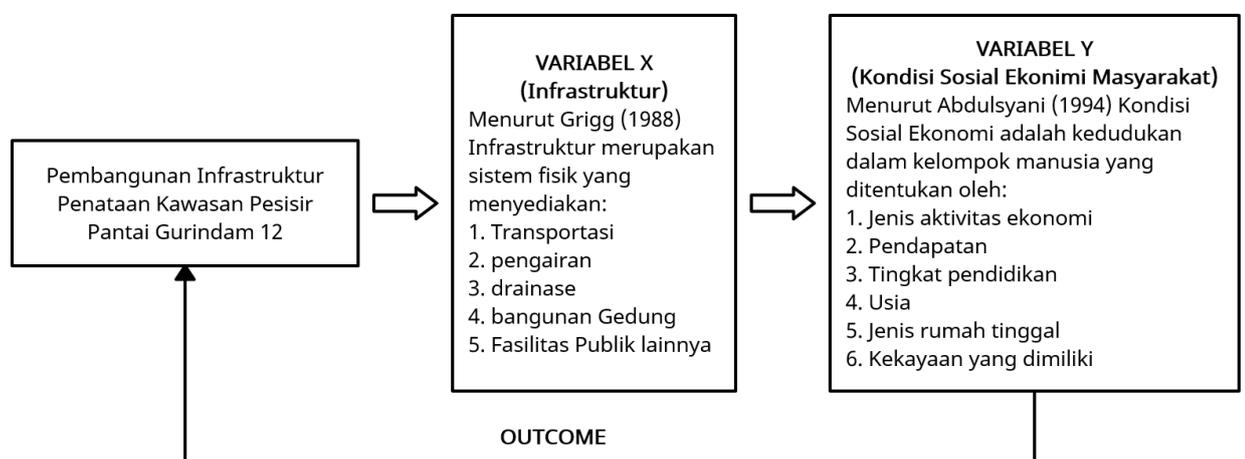
Reklamasi di Kelurahan Wenang Selatan), Kondisi Sosial Ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang dimiliki.

Disini peneliti menyimpulkan dimensi-dimensi atau indikator-indikator yang terdapat di dalam teori Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yakni:

1. Jenis aktivitas ekonomi
2. Pendapatan
3. Tingkat pendidikan
4. Usia
5. Jenis rumah tinggal
6. Kekayaan yang dimiliki

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka peneliti mengungkapkan hipotesis penelitian sebagai berikut: **“Ada Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Laman Boenda Kota Tanjungpinang”**.

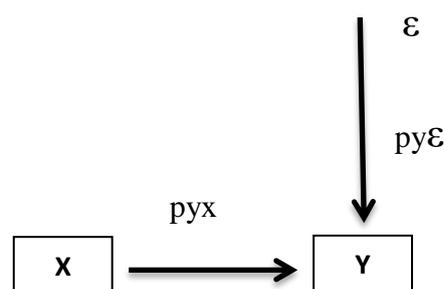
Hipotesis diatas adalah hipotesis penelitian yang sifatnya substantif dan verbal yang artinya masih bersifat kata-kata atau verbal dan substantif atau langsung kepada permasalahan. Hipotesis penelitian ini sukar diuji secara langsung, untuk keperluan pengujian ini harus diterjemahkan ke dalam hipotesis statistik, yang sifat operasionalnya sebagai berikut:

- a. **$H_0 : \rho_s = 0$** , artinya tidak ada perbedaan pengaruh antara Infrastruktur (X) dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Y)
- b. **$H_1 : \rho_s \neq 0$** , artinya ada perbedaan pengaruh Infrastruktur (X) dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Y)

Berikut ini peneliti menerjemahkan paradigma penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.2

Paradigma Peneliti



Keterangan:

X = Infrastruktur

Y = Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

ε = Variabel dari luar Infrastruktur yang tidak diukur yang
mempengaruhi Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

$py\varepsilon$ = Pengaruh variabel lain diluar penelitian infrastruktur terhadap
kondisi sosial ekonomi masyarakat

pyx = Pengaruh infrastruktur terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat